

SENI BAHASA PEREMPUAN: IDEOLOGI DI BALIK WACANA

I Gede Mudana

Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Bali
Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Telp. +62-361-701981 ext. 196
Email: igedemudana@yahoo.com

Ni Wayan Ardini

PS Seni Karawitan, Institut Seni Indonesia Denpasar
Jalan Nusa Indah, Denpasar, Bali, Telp. +62-361-227316

ABSTRACT. *Behind language, including women's language, there is an ideology that works in it. From the aspect of how the ideology works and the language relates to the system of power, critical cultural studies will be helpful to explain such a phenomenon, as a discourse, because it assumes the dominance of male power over women. Moreover, it is a discipline which holds that there is no objective, neutral knowledge (including language). This article is a literature review to deconstruct ideology that works behind it according to the paradigm of cultural studies itself.*

KEYWORDS: *Women, language, discourse, ideology.*

PENDAHULUAN

Jenis bahasa perempuan sesungguhnya berbeda dengan jenis bahasa laki-laki. Kata "sesungguhnya" di sini lebih mengacu pada kenyataan bahwa hal itu sering tidak disadari adanya. Keberagaman bahasa seperti itu tentu biasanya hanya menjadi perhatian kaum sosiolinguis. Namun, jangan lupa, dalam konteks pembicaraan kajian budaya kritis (*critical cultural studies*), pandangan tersebut pasti harus disetujui. Dikatakan ada perbedaan atau tepatnya ketimpangan kebahasaan antara laki-laki dan perempuan karena bahasa digenderkan secara tidak seimbang/adil, di mana di dalamnya, perempuan dikuasai laki-laki.

Kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dalam kaitan dengan bahasa seperti itu biasanya berbentuk apa yang dikonsepsikan oleh pemikir politik kenamaan bernama Gramsci asal Italia sebagai hegemoni, dari kata *hegeisthai* yang berarti *to lead*. Mengacu pada karya-karya Gramsci, Mudana (2012: 118; 2012a: 19-23) dan Wija (2013: 25) berpendapat bahwa hegemoni adalah kekuasaan yang tidak bersifat fisik, sehingga yang dikuasai menerima sebagai sesuatu yang wajar. Dengan cara yang berbeda, Rupert (2010: 234) menulis, bagi Gramsci, hegemoni adalah jenis hubungan kekuatan sosial khusus yang kelompok-kelompok dominannya mengamankan posisi mereka atas hak-hak istimewa dengan cara sebagian besar melalui cara-cara konsensus.

Bahasa perempuan (*women's language*) yang dimaksud dalam tulisan ini adalah berbagai bentuk seni kebahasaan, termasuk ucapan dan tulisan kaum perempuan. Bahasa yang

dimaksud di sini secara sederhana sama dengan pengertian dalam linguistik (ilmu bahasa). Mengacu pada buku *Bahasa Perempuan, Sebuah Potret Ideologi Perjuangan* karya Anang Santoso (2009), bahasa bukan sekadar ujaran (*speech*) tetapi wacana (diskursus) karena di balik ekspresi bahasa, terdapat ideologi tertentu yang ingin disampaikan dan diperjuangkan oleh pengujar (perempuan) baik ujaran yang bersifat manifes (ekspresif) maupun laten (tersembunyi, diam-diam).

Santoso (2009: 143) menjelaskan contoh terkait berikut. Suami-suami akan ketakutan apabila dilaporkan istrinya kepada pihak yang berwajib dengan alasan KDRT. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa istilah KDRT (= kekerasan dalam rumah tangga) sudah menjadi wacana perempuan untuk selanjutnya menjadi instrumen perjuangan ke arah kesetaraan, bahkan mungkin dalam jangka panjang berupa ke arah persamaan, seperti yang dilakukan oleh gerakan feminis *Women Liberation (Women Lib)* di Amerika Serikat.

Tulisan ini merupakan sebuah analisis bidang kajian budaya kritis (*critical cultural studies*) berbentuk review kepustakaan (*literature review*) tentang seni bahasa perempuan dengan melihat atau lebih tepat mendekonstruksi ideologi-ideologi yang diam-diam bersembunyi di dalamnya. Dekonstruksi adalah salah satu gaya terpopuler kajian budaya, yang berasal dari pakar bernama Jacques Derrida asal Perancis. Dekonstruksi yang dimaksud di sini adalah pembongkaran terhadap realitas bahasa perempuan untuk mengetahui ideologi-ideologinya dalam rangka rekonstruksinya. Karenanya bahasa dalam tulisan ini dikembangkan sebagai wacana, yang dalam kajian budaya dipahami sebagai diskursus.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan sebuah studi kepustakaan (*literature review*) berdasarkan analisis kajian budaya, khususnya kajian budaya kritis, sebagai bagian dari sebuah penelitian kualitatif yang dengan demikian seluruh data dan aspek teoretisasinya diambil dari kepustakaan yang ada. Data yang ditemukan dibahas dan dibincangkan dengan analisis kajian budaya kritis tersebut. Menurut Kutha Ratna (2010: 408), kajian budaya lebih memberikan perhatian pada budaya minoritas, budaya permukaan, peristiwa-peristiwa aktual yang ada di sekitar kehidupan manusia kontemporer. Dari segi teori, kajian budaya menggunakan teori-teori kritis dan kontemporer atau posmodernisme.

Kajian budaya sendiri adalah ilmu yang bersifat politis. Hal ini karena ia memiliki agenda tertentu untuk mengemansipasi yang terpinggirkan dan yang dikalahkan oleh struktur. Mengacu pada McGuigan, secara umum kajian budaya lebih mengutamakan mereka yang berasal dari posisi-posisi subordinasi dan marginalitas sosial (Mulhern, 2010: 201). Dalam konteks studi ini, yang terpinggirkan dan mengalami subordinasi adalah perempuan.

Karenanya, kajian budaya sebagai sebuah studi pascadisipliner harus mendekonstruksi agar ada proses emansipasi di dalamnya. Menurut Zehfuss (2010: 192), dekonstruksi sendiri adalah politis. Ia begitu kuat mengganggu cara-cara standar kita memahami dunia. Apa yang kita mungkin telah terima begitu saja, dengan adanya dekonstruksi, kini harus dipertimbangkan kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan tema yang dibahas dalam tulisan ini, tentu harus diperhatikan adanya perbedaan antara bahasa (*language*) dan wacana atau diskursus (*discourse*). Bahasa secara konseptual berbeda dengan wacana. Bahasa adalah sistem simbol dalam tata komunikasi sosial manusia. Wacana (maksudnya: diskursus), menurut Michel Foucault (1980), adalah teks-teks yang memiliki gagasan, pengetahuan, sikap, aturan, tulisan, diskusi, omong-omong, yang di dalamnya terkandung kepentingan, ideologi, subjektivitas, kekuasaan, praktik, dan kombinasi dari semuanya.

Wacana, yakni diskursus, memiliki pengertian yang sulit-rumit karena ia tidak hanya bersifat linguistik tetapi lebih ke pemahaman ilmu-ilmu sosial dan/atau politik. Itulah sebabnya wacana dalam pengertian diskursus tersebut menjadi *subject-matter* yang laris di kalangan pengkaji budaya karena di sini bahasa senantiasa dikaitkan dengan berbagai hal di luar bahasa. Bahasa tidak sekadar fenomena internal linguistik tetapi lekat dengan situasi eksternal kebahasaan. Situasi eksternal kebahasaan menunjukkan bahwa wacana tidak lagi berada di ranah linguistik (ilmu bahasa) tetapi ilmu-ilmu yang lebih luas. Menurut Neal (2010: 220), Michel Foucault adalah orang yang dapat dikenang karena membawa gagasan tentang "wacana (diskursus)" ke dalam ilmu-ilmu sosial.

Dalam linguistik, wacana secara umum adalah ujaran-ujaran verbal yang besarnya lebih luas dari kalimat. Namun, di sini yang dimaksudkan adalah wacana sebagai diskursus dan jauh lebih luas dari sekadar teks (*text*) dan bahkan diskursus tidak harus bersifat tekstual. Berkaitan dengan hal ini, dalam *Key Concepts in Communication and Cultural Studies*, O'Sullivan, *et al* (1994: 94) mengartikan "discourse" sebagai "...though discourses may be traced in texts, and though texts may be the means by which discursive knowledges are circulated, established or suppressed, discourses are not themselves textual".

Dalam arti adanya keterlibatan subjektivitas, berbeda dengan wacana, teks merupakan penuturan verbal yang telah lepas dari posisi penuturnya (Alam, 1998; Alam, 1999). Begitu sebuah teks diluncurkan, ia tidak memiliki keterhubungan apa pun dengan pembuatnya. Dengan itu, pembuat teks melepaskan teks begitu saja dari dirinya. Hal ini berarti, dalam pembicaraan wacana, antara penutur dan wacana yang disampaikan tetap terdapat ikatan

tertentu. Ketidaglepasan wacana dari posisi penuturnya adalah karena pembuatnya memiliki kepentingan tertentu atas wacananya. Menurut Foucault (1980), wacana adalah suatu bentuk penuturan verbal yang berkaitan erat dengan “kepentingan” penutur, sehingga dapat merupakan suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan.

Analisis terhadap wacana bukan sekadar suatu teori linguistik tetapi teori sosial, yaitu suatu teori tentang produksi kenyataan sosial yang tidak terpisahkan dari apa yang lazim dipandang sebagai “kenyataan sosial” (Escobar, 1999). Hal ini karena, seperti kata Foucault (2002: 9), *discourse* tidak lain cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek tersebut.

Meskipun teks hanya bagian kecil dari wacana, wacana tidak bisa lepas dari bahasa. Menurut Escobar (1999), postrukturalisme berfokus pada peran bahasa dalam mengonstruksi kenyataan sosial. Artinya, bahasa bukan cermin melainkan unsur konstitutif “kenyataan”. Itulah sebabnya, mengacu pada pendapat Escobar tersebut, wacana diartikan sebagai artikulasi pengetahuan dan kuasa, pernyataan dan kenampakan, yang tampak dan terekspresikan. Melalui proses wacana, kenyataan sosial mendapat wujudnya.

Dalam *The Archaeology of Knowledge* (1972) dan sebuah tulisan berjudul “The Order of Discourse” (1981), Foucault mendefinisikan wacana secara lebih rinci, yaitu berdasarkan kekuasaan. Bentuk-bentuk kekuasaan tersebut terwujud dalam bahasa-bahasa khusus dan resmi (Grenz, 1996: 211). Terkait dengan hubungan seperti itu, Foucault (1977: 27-28) menulis sebagai berikut:

”Kekuasaan menciptakan pengetahuan... Kekuasaan dan pengetahuan saling menghasilkan... Tidak ada kekuasaan tanpa hubungan dengan bidang pengetahuan tertentu. Tidak ada pengetahuan yang tidak memuat hubungan dengan kekuasaan. Hubungan “kekuasaan-pengetahuan” ini harus diteliti... bukan berdasarkan seorang peneliti yang bebas atau tidak dari kekuasaan. Sebaliknya, subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, dan bahan-bahan pengetahuan harus dipandang sebagai dampak implikasi dari hubungan kekuasaan-pengetahuan dan perubahan-perubahannya dalam sejarah. Singkatnya, bukanlah tindakan subjek yang menghasilkan pengetahuan, tetapi kekuasaan-pengetahuan, proses dan pergulatan yang mewarnainya dan menciptakannya, yang menentukan bentuk dan bidang pengetahuan yang mungkin”.

Dengan itu, tidak mengherankan, menurut Storey (2003: 132), analisis “genealogi” berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) dan bagaimana hubungan tersebut beroperasi dalam apa yang disebutnya sebagai formasi-formasi

diskursif, yaitu kerangka-kerangka konseptual yang mengajukan sejumlah cara (mode) berpikir dan menolak cara-cara berpikir lainnya.

Bagi Foucault, wacana adalah kerangka kerja yang ditentukan oleh yang berkuasa yang ditetapkan melalui hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasarinya (Fakih, 1997: 169). Dengan demikian, setiap wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari “kepentingan” dan “kekuasaan”. Dalam suatu masyarakat dapat dijumpai berbagai macam wacana tentang kebudayaan masyarakat bersangkutan yang bisa saja saling bertentangan, namun dengan dukungan dari kekuasaan, wacana tertentu akan menjadi wacana dominan (Alam, 1998), sedangkan wacana-wacana lainnya akan “terpinggirkan” atau “terpendam” (Alam, 1999). Contoh bagus dari pertarungan antarwacana seperti telah digambarkan adalah keadaan wacana politik di Indonesia, khususnya selama masa Orde Baru (Mudana, 2005). Philpott (2003: 5) menyatakan, kesan mencolok dari wacana politik Indonesia adalah bahwa ia mengesampingkan praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak di luar negara, yaitu masyarakat sipil.

Gavin Kitching dalam sebuah tulisannya tentang “language and discourse” pada buku *The Trouble with Theory, the Educational Costs of Postmodernism* (2008) menyatakan, ...*the power of discourse is not simply the power of language, but the power of a whole set of linguistic and non-linguistic practices to create both the world and the subjectivities of the subjects acting in that world* (hal. 40). (...kekuasaan diskursus tidak hanya merupakan kekuasaan bahasa, tetapi kekuasaan dari keseluruhan yang utuh praktik-praktik linguistik dan non-linguistik untuk menciptakan dunia maupun subjektivitas dari subjek-subjek yang bertindak dalam dunia tersebut).” Bagi Kitching, praktik-praktik linguistik dan aspek-aspek non-linguistik tidak terpisahkan dalam membentuk kekuasaan di dalamnya. Ini berarti bahasa tidak bisa dilepaskan dari situasi yang mengelilinginya.

Bahasa selalu terikat ruang, waktu, dan situasi/keadaan manusianya atau yang di Bali dipahami sebagai *desa, kala, patra*. Ruang (*desa*) mengacu pada kedisinian-kedisanaan (*hereness-thereness*), waktu (*kala*) pada kekinian-kenantian (*nowness-laterness*), dan situasi manusia (*patra*) pada keadaan relatif si pengujar (penutur). Dahulu misalnya, praktik-praktik kebahasaan masyarakat Bali sangat dipengaruhi kosmologi pertanian. Berbagai gaya bahasa terkait atau dikaitkan dengan situasi dunia alam pertanian. Alis terindah perempuan diibaratkan sebagai *don* (daun) *intaran*. Kini, ketika secara perlahan tetapi pasti budaya industrialisasi pariwisata menguasai kehidupan mereka, alis yang diidealkan tidak lagi mengacu pada kecantikan klasik-tradisional semisal *don intaran* tetapi pada kosmologi post-realitas global yang Barat (post)modern.

Menggunakan analisis kritis kajian budaya, ideologi-ideologi diasumsikan bekerja di balik wacana kebahasaan. Sebagai ideologi, ideologi-ideologi yang bersembunyi tersebut sering tidak disadari keberadaannya, khususnya oleh masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. Mengacu pada Eagleton, Althusser melihat bahwa ideologi tidak hanya terdapat dalam hubungan antara suprastruktur dan substruktur atau hubungan antara negara dan rakyat atau hubungan antara buruh dan majikan. Ideologi terdapat pada hubungan yang lain, bahkan dalam hubungan sehari-hari antar-orang per orang. Baginya, ideologi ada pada diri setiap orang, hanya saja tidak disadari (Takwin, 2009: 84). Hubungan antar-orang yang dimaksudkan Eagleton senada dengan praktik komunikasi kebahasaan sehari-hari di masyarakat.

Dalam sejarahnya, Weedon, dkk (2011: 307-308) menyatakan, persoalan ideologi, baik dalam kajian budaya secara umum maupun dalam kajian budaya secara khusus, telah secara luas diperdebatkan di Inggris dan di luar negeri Inggris pada tahun 1970-an, baik di dalam maupun di luar institusi akademik. Hall, dkk dalam bukunya yang sangat terkenal dan menjadi fondasi kajian budaya Inggris berjudul *Budaya, Media, Bahasa* (2011) mencatat, kajian budaya terkait erat dengan persoalan bahasa dengan membagi wacana kajian budaya menjadi tiga, yaitu etnografi, kajian media, dan kajian bahasa.

Menurut Santoso (2009: 1), bahasa perempuan selalu merepresentasikan model pandangan hidup tertentu, yakni gambaran sebuah konstruksi dunia yang bulat dan utuh tentang ide hidup dan kehidupan yang sudah ditafsirkan dan diolah perempuan. Chris Barker mengamini, pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena yang netral atau objektif tetapi lebih merupakan persoalan posisionalitas, persoalan darimana seseorang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa (2005: 7). Dengan itu, kajian budaya senantiasa melakukan pembelaan tertentu pada entitas sosial yang terpinggirkan, seperti perempuan. Kajian ini bersifat kritis, politis, dan ideologis. Karenanya, produk kajian budaya bergantung banyak pada posisi ideologis (dan teoretis) pengkajinya.

Benedict R O'G Anderson dengan sangat bagus menulis hubungan antara bahasa-bahasa di Indonesia dan kekuasaan yang ada dalam *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* (1990). Dalam buku ini, tidak saja kekuasaan, bahkan budaya politik keindonesiaan pun, lebih-lebih budaya Jawa sebagai budaya dominan, dapat diselusuri melalui bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Ben Anderson menganjurkan bahwa logika konsepsi Kekuasaan tradisional Jawa membutuhkan karakter yang memusat, sinkretik, dan absorpsif, di mana pemusatan ini biasanya disadari ada dalam diri penguasa (1990: 38). Contohnya ada pada diri Ken Arok, Panembahan Senapati, Sukarno, dan Suharto.

Indonesia masa kini tidak (banyak) memiliki perempuan-perempuan penguasa. Akibatnya, seni kebahasaan yang "dominan perempuan" tidak banyak ditemui. Menurut Santoso, bahasa perempuan lebih sering dan cenderung menggunakan gaya tutur kooperatif sebaliknya laki-laki menggunakan gaya kompetitif (2009: 2). Padahal, dengan seni kebahasaan tertentu, perempuan pun potensial membalikkan dominasi laki-laki. Paling tidak agar ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Bagi Fairclough (1995: 2), ideologi penghasil teks disembunyikan atau ditampilkan melalui piranti lingual/kebahasaan, yaitu (1) kata, (2) metafora, (3) gramatika, (4) presuposisi dan implikatur, (5) konvensi kesantunan, (6) sistem pengambilan giliran, (7) struktur generik, dan (8) gaya tuturan. Terkait dengan itu, Santoso (2009) menyatakan, melalui pilihan kosakata dan pilihan gramatika, perempuan memerjuangkan ideologinya. Pada pilihan kata, perempuan memerjuangkan ideologi-ideologi (1) keterikatan pada struktur, (2) penolakan terhadap hakikat kodrat, (3) pembelaan terhadap kelompoknya yang tertindas, (4) pengambilan distansi untuk menunjukkan kemampuan, (5) pengurangan distansi dalam kerangka solidaritas, (6) pemberontakan terhadap kemapanan laki-laki, (7) perasaan senasib dengan sesamanya, dan (8) teguh dalam berjuang. Sementara melalui pilihan gramatika, perempuan memerjuangkan ideologi-ideologi (1) keteguhan dalam bersikap dan bertindak, (2) pengendalian afeksi dalam mengodekan realitas, (3) penonjolan agen untuk menunjukkan kausalitas, (4) penyembunyian agen untuk mengaburkan kausalitas, (5) memerhalus tuturan untuk memperpendek jarak sosial, (6) pemertahanan terhadap keadaan yang sudah ada, (7) pemberontakan terhadap realitas di sekelilingnya, (8) penonjolan peran individu, (9) selalu mendorong terciptanya sebuah aktualisasi, dan (9) penonjolan otoritas dalam membentuk realitas.

Di sini harus lebih ditegaskan konsep-konsep teoretis jenis kelamin (*sex*) dan gender. Secara umum, jenis kelamin bersifat fisik, biologis, dan tidak bisa berubah. Sebaliknya, gender adalah konstruksi sosial masyarakat terhadap jenis kelamin. Gender dengan demikian bervariasi antar tempat dan/atau antarwaktu. Feminisme sendiri tampil dalam situasi perempuan dinomorduakan dan dipinggirkan dibandingkan laki-laki.

Bahasa sendiri bukan persoalan jenis kelamin tetapi permasalahan gender. Membicarakan jenis kelamin dan gender tidak mungkin lepas dari feminisme. Karena perempuan dinomorduakan dalam bahasa, diperlukan kesetaraan bahasa dari segi gender dan di sinilah feminisme kebahasaan dibutuhkan. Ini pulalah yang dimaksud dengan salah satu bentuk rekonstruksi sosial dalam kajian budaya.

Secara umum feminisme melihat seks/jenis kelamin sebagai sebuah sumbu organisasi sosial yang fundamental dan tidak bisa direduksi yang, sampai saat ini, telah menempatkan

perempuan di bawah laki-laki. Dengan demikian, perhatian utama feminisme adalah pada jenis kelamin sebagai prinsip pengaturan kehidupan sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan. Para feminis melihat bahwa subordinasi perempuan terjadi di berbagai lembaga dan praktik, atau dengan kata lain, bahwa subordinasi tersebut bersifat struktural. Subordinasi struktural inilah yang disebut sebagai patriarkhi, bersama dengan makna-makna turunannya tentang keluarga yang dipimpin laki-laki, penguasaan, dan superioritas (Barker, 2005: 296-297).

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa melalui bahasa, kekuasaan laki-laki atas perempuan (budaya patriarkhi) potensial dilanggengkan dan bahkan dikembangkan. Untuk itu, harus selalu diupayakan secara ideologis agar ada kesetaraan gender dalam bahasa (kesetaraan bahasa). Mengacu Santoso (2009: 16), bahasa perempuan tidak boleh lagi dipandang fenomena unik yang harus mendapat perlakuan khusus. Bahasa perempuan haruslah memperoleh tempat yang sewajarnya seperti bahasa (laki-laki) yang selama ini menjadi pengetahuan umum bagi kita.

Dengan demikian, analisis kajian budaya kritis terhadap bahasa perempuan layak dan signifikan dilakukan menuju kesetaraan laki-laki-perempuan dalam semua bidang kehidupan. Studi seperti ini tentu akan lebih kontekstual secara intelektual apabila dilanjutkan dengan studi-studi lain sejenis yang lebih melihat keadaan senyatanya objek dan subjek studi. Hal ini karena konteks-konteks setiap komunitas perempuan di dunia sangat berbeda-beda. Dalam kajian budaya telah dijelaskan bahwa situasi gender antartempat dan waktu begitu beragam, yang membutuhkan studi yang berbeda-beda pula.

Disarankan ada studi yang lebih mendalam dan komprehensif tentang ketidaksetaraan kebahasaan di Indonesia, terutama bahasa Indonesia, yang memotret seluruh situasi kebahasaan di Indonesia secara umum, sehingga praktik-praktik yang mengorbankan perempuan dalam bahasa bisa direduksi atau bila memungkinkan dihilangkan sama sekali. Tentu saja hal ini harus dimulai dari perlunya gerakan feminisme secara umum terlebih dahulu, sebelum feminisme di bidang bahasa. Hal ini karena secara umum dikenal bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bias-gendernya cukup tinggi di mana perempuan hampir selalu mendapat posisi yang rendah dan dikalahkan.

Disarankan lebih lanjut bahwa gerakan perbaikan kebahasaan yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki seharusnya dimulai dari ranah-ranah resmi, seperti kantor-kantor pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan, terutama kampus-kampus perguruan

tinggi. Dengan begitu, akan ada efek tertentu bagi penggunaannya di tingkat masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Bachtiar. (1998). "Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan", *Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia/Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Tahun XXI Nomor 54, hal. 1-10.
- Alam, Bachtiar. (1999). "Antropologi dan 'Civil Society': Pendekatan Teori Kebudayaan", *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Tahun XXIII Nomor 60, hal. 3-10.
- Anderson, Benedict R O'G. (1990). *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies, Teori dan Praktik* (terjemahan). Yogyakarta: Bentang.
- Escobar, Arturo. (1999). "Mengkonstruksi Alam, Menegakkan Ekologi Politik Pascastuktural" (terjemahan), *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 1, Vol. 1, hal. 59-85.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Fakih, Mansour. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. (1972). *The Archaeology of Knowledge & the Discourse on Language* (terjemahan *L'archeologie du Savoir*). London: Tavistock Publications Limited.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (terjemahan Alan Sheridan). New York: Vintage Books.
- Foucault, Michel. (1980). *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Sussex: The Harvester Press.
- Foucault, Michel. (1981). "The Order of Discourse" dalam Robert Young (Ed.), *Untying the Text: A Post-Structuralist Reader*. London: Routledge & Kegan Paul, hal. 48-78.
- Foucault, Michel. (2002). *Pengetahuan dan Metode, Karya-karya Penting Foucault* (suntingan, terjemahan *Aesthetics, Method, and Epistemology, Essential Works of Foucault 1954-1984*). Yogyakarta: Jalasutra.
- Grenz, Stanley J. (1996). *A Primer on Postmodern, Pengantar untuk Memahami Postmodern* (terjemahan). Yogyakarta: Yayasan Andi.
- Hall, Stuart, D. Hobson, A. Lowe, dan P. Willis (eds.). (2011). *Budaya, Media, Bahasa* (terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.
- Kitching, Gavin. (2008). *The Trouble with Theory, the Educational Costs of Postmodernism*. NSW: Allen & Unwin.
- Kutha Ratna, Nyoman. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudana, I Gede. (2005). "Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot, Desa Beraban, Tabanan, Bali", disertasi, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Mudana, I Gede. (2012). *Konflik Kepentingan dalam Pariwisata Budaya*. Denpasar: Cakra Press.
- Mudana, I Gede. (2012a). *Wacana Hegemoni dan Kontra-hegemoni Pembangunan Pariwisata Budaya*. Denpasar: Cakra Press.
- Mulhern, Francis. (2010). *Budaya/Metabudaya* (terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.

- Neal, Andrew W. (2010). "Michel Foucault" dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams (eds.) *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Baca!, halaman 214-226.
- O'Sullivan, Tim, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, dan J. Fiske. (1994). *Key Concepts in Communication and Cultural Studies*. London: Routledge.
- Philpott, Simon. (2001). *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme* (Cetakan Pertama, terjemahan). LKiS: Yogyakarta.
- Rupert, Mark. (2010). "Antonio Gramsci" dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams (eds.) *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Baca!, halaman 233-246.
- Santoso, Anang. (2009). *Bahasa Perempuan, Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Storey, John. (2003). *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual "Cultural Studies"* (terjemahan). Yogyakarta: Qalam.
- Takwin, Bagus. (2009). *Akar-akar Ideologi, Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Weedon, Chris, A. Tolson, dan F. Mort. (2011). "Pengantar Kajian Bahasa di Centre (for Contemporary Cultural Studies) dalam Stuart Hall, dkk., *Budaya, Media, Bahasa, Teks Utama Pencanang Cultural Studies 1972-1979* (terjemahan)". Yogyakarta: Jalasutra, halaman 297-310.
- Wija, I Nyoman. (2013). *Pesta Kesenian Bali, Pesta Media Massa*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Zehfuss, Maja. (2010). "Jacques Derrida" dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams (eds.) *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Baca!, halaman 182-213.